

## Peran PBB dalam Advokasi Hak Masyarakat Adat dan Kegagalan *The Voice to Parliament* di Australia

Bunga Aprilliyanti, Alvinnur Salsabilah, Amalya Putri S.L, Radhitya Ziqry Razzani, Roy Setiawan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia  
Email: bungaaprilliyanti0416@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mendorong pengakuan hak-hak politik masyarakat adat di Australia. Ini meneliti marginalisasi historis masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, keterbatasan reformasi domestik seperti referendum 1967 dan referendum 2023 yang gagal tentang Suara Pribumi ke Parlemen, dan tanggapan internasional yang dipimpin oleh mekanisme PBB. Dengan menganalisis instrumen utama PBB-khususnya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan laporan dari Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat-artikel ini berpendapat bahwa PBB telah memainkan peran normatif dan diplomatik yang signifikan dalam mempromosikan inklusi politik. Intervensi PBB telah menekan pemerintah Australia untuk menyelaraskan dengan standar internasional tentang hak-hak adat, meskipun implementasi domestik tetap tidak konsisten. Makalah ini menyimpulkan bahwa meskipun PBB tidak dapat memaksa perubahan hukum, advokasi, pemantauan, dan penetapan standar yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung perjuangan masyarakat adat untuk pengakuan politik di Australia.

**Kata kunci:** Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak-hak adat; Australia; pengakuan politik; UNDRIP

### Abstract

*This article explores the role of the United Nations (UN) in encouraging the recognition of Indigenous peoples' political rights in Australia. It examines the historical marginalization of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, the limitations of domestic reforms such as the 1967 referendum and the failed 2023 referendum on the Indigenous Voice to Parliament, and the international responses led by UN mechanisms. By analyzing key UN instruments-particularly the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and the reports from the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples-this article argues that the UN has played a significant normative and diplomatic role in promoting political inclusion. The UN's interventions have pressured the Australian government to align with international standards on Indigenous rights, although domestic implementation remains inconsistent. The paper concludes that while the UN cannot compel legal change, its continued advocacy, monitoring, and standard-setting are crucial in supporting Indigenous communities' struggles for political recognition in Australia.*

**Keywords:** *United Nations; Indigenous rights; Australia; political recognition; UNDRIP*

\*Correspondence Author: Bunga Aprilliyanti  
Email: [bungaaprilliyanti0416@gmail.com](mailto:bungaaprilliyanti0416@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Pengakuan hak politik masyarakat adat telah menjadi isu penting dalam hak asasi manusia dan demokrasi global (Tumbel, 2020). Masyarakat adat, termasuk di negara maju seperti Australia masih menghadapi hambatan struktural dalam mendapatkan pengakuan politik dan partisipasi dalam sistem pemerintahan. Padahal pengakuan atas hak politik masyarakat adat merupakan bagian dari upaya dekolonisasi dan penegakan keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Australia adalah negara dengan sejarah panjang kolonialisme yang berdampak besar terhadap masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Meskipun secara demografi jumlah masyarakat adat relatif kecil-sekitar 3,8% dari populasi Australia (Australian Bureau of

Statistics, 2021) mereka menghadapi ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk keterwakilan politik, kepemilikan lahan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap masyarakat adat dalam Konstitusi Australia (Reconciliation Australia, 2022). Ketimpangan ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam memastikan keadilan dan kesetaraan bagi kelompok masyarakat adat.

PBB sebagai organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, telah mengambil peran penting dalam mendorong negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Melalui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang diadopsi pada tahun 2007, PBB menegaskan hak masyarakat adat atas pengakuan identitas, partisipasi politik, dan penentuan nasib sendiri (United Nations, 2007). Australia awalnya menolak deklarasi ini tetapi kemudian memberikan dukungan pada tahun 2009. Meskipun demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam kebijakan domestik yang konkret.

Salah satu upaya terbaru untuk mengakui hak masyarakat adat di Australia adalah referendum tentang *The Indigenous Voice to Parliament*. Referendum ini bertujuan untuk mencantumkan pengakuan masyarakat adat dalam Konstitusi dan memberikan mekanisme bagi mereka untuk menyuarakan pandangan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung. Namun, hasil referendum pada Oktober 2023 menunjukkan mayoritas pemilih menolak usulan tersebut (BBC News, 2023). Kegagalan ini memperlihatkan tantangan besar dalam mewujudkan pengakuan politik terhadap masyarakat adat, meskipun ada dukungan kuat dari komunitas internasional termasuk PBB.

PBB melalui mekanisme seperti *Universal Periodic Review* (UPR) dan Dewan HAM telah secara aktif mendorong pemerintah Australia untuk menghormati hak-hak masyarakat adat. Dalam laporan UPR terbaru, beberapa negara anggota PBB mendesak Australia untuk mengakui masyarakat adat dalam konstitusi dan memastikan representasi politik yang adil (United Nations Human Rights Council, 2021). Selain itu, forum seperti *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII) berfungsi sebagai ruang bagi komunitas adat global untuk menyuarakan aspirasi mereka dan meningkatkan kesadaran internasional mengenai isu-isu ketidakadilan (UN DESA, 2023).

Peran PBB tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup dukungan praktis melalui program pembangunan kapasitas, pendidikan, dan advokasi bersama organisasi masyarakat adat. Badan-badan seperti UNDP dan UNESCO telah meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat adat, termasuk di Australia melalui pelatihan kepemimpinan dan dokumentasi budaya (Australian Government, 2019). Meski tidak memiliki kekuatan memaksa secara langsung, dorongan moral dan diplomatik PBB tetap memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik dan arah kebijakan pemerintah.

Penolakan terhadap referendum "*Voice to Parliament*" menunjukkan masih kuatnya resistensi politik dan kurangnya pemahaman publik tentang pentingnya keterwakilan masyarakat adat. Beberapa kelompok politik menilai bahwa pengakuan semacam itu tidak diperlukan, atau justru berpotensi menciptakan perpecahan (VOA Indonesia, 2023). Di sisi lain, masyarakat adat merasa bahwa suara mereka terus-menerus diabaikan dan bahwa konsultasi yang dilakukan pemerintah tidak mencerminkan komitmen sejati terhadap rekonsiliasi.

Penelitian sebelumnya oleh Maddison (2009) menyoroti bahwa kegagalan Australia dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat bukan hanya akibat minimnya kebijakan afirmatif, tetapi juga karena absennya komitmen politik yang nyata terhadap rekonsiliasi struktural. Ia menyimpulkan bahwa tanpa reformasi konstitusional, masyarakat adat akan tetap berada dalam posisi marginal meskipun terdapat dukungan normatif dari aktor internasional. Sementara itu, Short (2010) dalam kajian tentang dampak normatif UNDRIP di Australia menunjukkan bahwa deklarasi tersebut lebih sering dijadikan simbol moral ketimbang alat advokasi yang efektif dalam reformasi kebijakan domestik. Kedua studi ini sama-sama menyoroti peran penting norma internasional dan advokasi lokal, namun belum membahas secara sistematis peran institusional PBB melalui mekanisme seperti Universal Periodic Review dan forum UNPFII dalam konteks pasca-kegagalan referendum 2023. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis bagaimana PBB, melalui pendekatan normatif dan institusional, tetap menjadi aktor transnasional yang relevan dalam mendorong pengakuan hak politik masyarakat adat di Australia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana peran PBB dalam mendorong pengakuan hak politik masyarakat adat di Australia. Dengan menggunakan pendekatan teoritis seperti konstruktivisme yang menjelaskan bagaimana norma internasional membentuk perilaku negara, dan institusionalisme, serta melihat bagaimana organisasi internasional memengaruhi kebijakan domestik, artikel ini akan menjelaskan efektivitas peran PBB serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam konteks Australia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara tekanan internasional dan dinamika kebijakan domestik, serta memberi manfaat bagi upaya advokasi masyarakat adat, pengambil kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan strategi berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran lembaga internasional, dalam hal ini PBB, dalam memengaruhi kebijakan domestik suatu negara melalui instrumen hukum internasional dan diplomasi multilateral. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pengakuan hak politik masyarakat adat merupakan isu kompleks yang melibatkan interaksi antara norma global, kebijakan domestik, dan dinamika sosial-politik lokal. Populasi data dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi dari PBB, laporan Universal Periodic Review (UPR), dokumen hukum Australia, serta hasil referendum tahun 2023 terkait *Voice to Parliament*.

Sampel data diambil secara purposive sampling, yakni memilih dokumen dan sumber relevan yang secara langsung membahas hubungan antara PBB, hak masyarakat adat, dan kebijakan Australia. Instrumen penelitian berupa lembar telaah dokumen dan pedoman analisis isi yang dirancang untuk mengidentifikasi elemen normatif, advokatif, dan diplomatik dari intervensi PBB. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, digunakan metode triangulasi sumber dengan membandingkan data dari dokumen internasional, media independen, dan laporan akademik yang relevan. Analisis juga melibatkan telaah pakar (*expert judgment*) terhadap kerangka teori konstruktivisme dan institusionalisme sebagai landasan konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dengan mengakses sumber primer dari situs resmi PBB, Australian Human Rights Commission, dan arsip berita internasional yang kredibel. Prosedur penelitian dimulai dari perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, klasifikasi tematik, hingga analisis. Peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk membantu proses analisis kualitatif tematik, yang memungkinkan pengkodean data secara sistematis dan identifikasi pola naratif. Teknik analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis dan interpretatif, yang memfokuskan pada makna di balik teks serta bagaimana narasi dan norma internasional membentuk wacana domestik mengenai hak politik masyarakat adat di Australia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran PBB dalam Mendorong Pengakuan Hak Politik Masyarakat Adat di Australia**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam mendorong negara-negara anggotanya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat termasuk hak politik. Dalam konteks Australia, PBB telah menggunakan berbagai instrumen dan mekanisme untuk menekan pemerintah agar mengakui hak-hak politik masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Salah satu instrumen kunci adalah *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 2007. Deklarasi ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka (UN, 2007).

Meski Australia sempat menolak UNDRIP pada awalnya bersama Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat negara ini akhirnya menyatakan dukungannya pada 2009. Dukungan tersebut merupakan hasil dari tekanan komunitas internasional dan advokasi masyarakat sipil domestik yang menginginkan pengakuan lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat (OHCHR, 2023). UNDRIP menjadi norma internasional yang tidak mengikat secara hukum, tetapi berpengaruh besar terhadap arah kebijakan nasional negara-negara anggota, termasuk dalam reformasi politik dan konstitusional.

PBB juga berperan melalui mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) Dewan HAM yang secara rutin mengevaluasi kondisi HAM di negara-negara anggota termasuk Australia. Dalam sesi UPR tahun 2021, beberapa negara anggota merekomendasikan Australia untuk memperkuat hak masyarakat adat termasuk hak atas partisipasi politik dan perwakilan yang adil. Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) juga menyuarakan keprihatinannya terhadap ketimpangan sistemik yang dialami masyarakat adat dalam hal keterlibatan politik (UN Human Rights Council, 2021).

Di sisi lain, dukungan PBB tidak hanya berbentuk tekanan diplomatik atau rekomendasi, tetapi juga melalui forum permanen seperti *UN Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII). Forum ini menjadi wadah penting bagi komunitas adat dari berbagai negara untuk menyuarakan aspirasi, berbagi praktik baik dan menyoroti pelanggaran hak-hak mereka di tingkat global. Perwakilan masyarakat adat Australia secara rutin mengikuti forum ini untuk mengangkat isu pengakuan konstitusional dan inklusi dalam sistem politik nasional (UNPFII, 2023).

Dalam konteks Australia, salah satu contoh nyata bagaimana norma internasional mendorong perdebatan nasional adalah melalui inisiatif "*The Voice to Parliament*". Usulan ini

bertujuan untuk membentuk badan representatif bagi masyarakat adat agar dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Meskipun referendum nasional untuk mendukung amandemen konstitusi demi pembentukan badan ini gagal pada Oktober 2023, dukungan moral dan advokasi dari para ahli HAM PBB terhadap referendum tersebut menjadi sorotan global. Lima pelapor khusus PBB mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan publik Australia untuk mendukung “*The Voice*”, dengan menyatakan bahwa inisiatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip UNDRIP dan kewajiban HAM internasional (OHCHR, 2023).

Meskipun PBB tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara mengubah konstitusinya, kehadiran dan tekanan dari organisasi internasional ini berkontribusi dalam menjaga agenda pengakuan hak-hak politik masyarakat adat tetap berada dalam diskursus publik dan politik domestik Australia. Selain itu, organisasi-organisasi seperti UNDP dan UNESCO juga turut membantu dengan menyediakan program pelatihan kepemimpinan, penguatan kapasitas komunitas adat, serta pendanaan proyek-proyek yang mendukung partisipasi politik yang lebih inklusif (Australian Government, 2019).

Efektivitas upaya PBB sangat bergantung pada kemauan politik negara yang bersangkutan. Dalam kasus Australia, meskipun ada langkah-langkah positif, ketimpangan politik dan hukum masih menjadi hambatan serius. Penolakan terhadap referendum “*The Voice*” mencerminkan adanya resistensi di tingkat nasional terhadap reformasi struktural yang lebih mendalam. PBB melalui pelapor khusus dan lembaga afiliasinya terus menyerukan pembenahan sistemik termasuk dalam kebijakan pemilu, pembentukan lembaga representatif masyarakat adat, dan reformasi konstitusi (UN Human Rights Council, 2023).

PBB juga telah menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak politik masyarakat adat bukan hanya isu domestik, tetapi menyangkut tanggung jawab global terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ketika Australia sebagai negara demokratis maju gagal memenuhi ekspektasi tersebut, maka kredibilitas komitmennya terhadap norma internasional patut dipertanyakan. Dalam hal ini, peran PBB bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai katalis perubahan normatif dan politis.

Dengan demikian, peran PBB dalam mendorong pengakuan hak politik masyarakat adat di Australia dapat dilihat melalui tiga strategi utama: 1) promosi norma internasional seperti UNDRIP; 2) tekanan diplomatik melalui UPR dan Dewan HAM; dan 3) fasilitasi dialog dan kolaborasi internasional melalui forum seperti UNPFII. Ketiganya membentuk ekosistem normatif yang dapat memengaruhi perubahan kebijakan domestik, meski tetap bergantung pada faktor internal Australia.

### **Upaya PBB dalam Mendorong Pengakuan Hak Politik Masyarakat Adat di Australia Pasca-Referendum 2023**

Pasca-gagalnya referendum “*Voice to Parliament*” pada Oktober 2023, PBB semakin aktif dalam mendorong Australia untuk tetap memenuhi kewajibannya dalam mengakui hak politik masyarakat adat. Referendum tersebut merupakan hal penting karena akan memberikan masyarakat adat suara konstitusional dalam proses legislasi, namun mayoritas rakyat Australia menolak perubahan konstitusi tersebut (BBC News, 2023). Kegagalan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) yang menilai Australia belum sepenuhnya mengadopsi norma-norma hak asasi manusia internasional.

Melalui berbagai lembaganya, PBB terus melakukan advokasi terhadap pemerintah Australia untuk memastikan bahwa hak politik masyarakat adat tidak diabaikan. Salah satu mekanisme utama yang digunakan adalah *Universal Periodic Review* (UPR). Dalam sesi UPR terbaru, sejumlah negara anggota PBB menyampaikan rekomendasi agar Australia mengambil langkah-langkah konkret dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk penguatan representasi politik dan pengakuan konstitusional (United Nations Human Rights Council, 2021).

Selain melalui UPR, *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII) juga menjadi forum penting bagi PBB dalam menyuarakan kepentingan masyarakat adat global termasuk Australia. Dalam sesi ke-22 pada tahun 2023, UNPFII secara eksplisit mengkritik minimnya kemajuan Australia dalam memenuhi standar *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), khususnya pada Pasal 18 dan 19 yang menekankan partisipasi politik dan konsultasi terhadap masyarakat adat (UNPFII, 2023). UNDRIP, meskipun bersifat non-binding tetap menjadi acuan normatif kuat dalam tata kelola HAM internasional.

Upaya diplomasi multilateral juga dilakukan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk HAM yang mengeluarkan pernyataan pasca-referendum 2023. PBB menyerukan agar pemerintah Australia tetap berkomitmen pada dialog dan reformasi kebijakan, meskipun proses referendum gagal secara formal. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa hak masyarakat adat adalah bagian integral dari hak asasi manusia, dan Australia sebagai negara maju memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan perlindungan (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2023).

Tekanan internasional dari PBB juga diperkuat oleh dukungan masyarakat sipil dan LSM global yang menyerukan agar Australia tetap melanjutkan proses rekonsiliasi dengan masyarakat adat. Amnesty International, misalnya, mengeluarkan laporan pada 2023 yang menyoroti bahwa kegagalan referendum tidak boleh menjadi alasan bagi Australia untuk menghentikan agenda pengakuan politik terhadap masyarakat adat. Amnesty menyatakan bahwa PBB harus memastikan bahwa standar UNDRIP tetap ditegakkan di Australia (Amnesty International, 2023).

Namun, upaya PBB tetap memiliki keterbatasan. PBB tidak memiliki otoritas untuk memaksa Australia mengubah konstitusinya atau mengimplementasikan kebijakan domestik tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan lebih bersifat advokatif dan persuasif melalui mekanisme soft law dan diplomasi normatif. Tekanan internasional ini tetap berkontribusi dalam membentuk opini publik dan memberi tekanan politik terhadap pemerintah Australia (Finnemore & Sikkink, 1998).

Upaya lain yang ditempuh oleh PBB adalah melalui kerja sama teknis dan bantuan pembangunan kapasitas. PBB telah mendukung program-program pelatihan hak asasi manusia yang melibatkan komunitas adat, termasuk pendidikan politik dan advokasi hak konstitusional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya di tingkat domestik (United Nations Development Programme, 2022).

Meskipun referendum 2023 berakhir dengan kegagalan, PBB tetap memainkan peran penting dalam menjaga komitmen Australia terhadap hak politik masyarakat adat. PBB tidak hanya memberikan tekanan normatif, tetapi juga menyediakan ruang advokasi dan dukungan teknis untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam sistem politik Australia. Dalam konteks ini, norma-norma internasional seperti UNDRIP dan mekanisme UPR menjadi alat penting dalam diplomasi internasional untuk mendesak perubahan kebijakan domestik secara damai dan berkelanjutan.

## **Tantangan yang Dihadapi PBB dalam Mendorong Australia Mengakui Hak Politik Masyarakat Adat**

### ***Hambatan Utama dalam Implementasi Rekomendasi PBB di Australia***

PBB telah lama berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat adat termasuk Australia. Melalui berbagai mekanisme seperti *Universal Regular Review* (UPR) dan Forum Hak Asasi Manusia (HAM), PBB telah mengeluarkan rekomendasi untuk menyadarkan hak-hak politik masyarakat adat. Namun, implementasi rekomendasi ini di Australia telah ditunda karena berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah sistem hukum Australia yang tidak secara otomatis membawa hukum internasional ke dalam hukum domestik. Akibatnya, rekomendasi PBB tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga aplikasi mereka sangat bergantung pada keputusan politik Australia (Gurinda, 2019).

Hasil referendum 2023 yang menolak pengakuan asli dalam Konstitusi menunjukkan adanya perlawanan yang kuat dari beberapa orang Australia terhadap perubahan ini (VOA Indonesia, 2023). Sementara referendum ini merupakan dinamika penting dalam perjuangan untuk status politik asli, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas warga Australia tidak sepenuhnya mendukung langkah ini. Banyak partai politik takut bahwa konsekuensi negatif ini akan terus memperlambat proses pendukung hak-hak adat di tingkat nasional dan internasional. Kebijakan domestik Australia, seperti pembatasan kewenangan suara masyarakat adat dalam parlemen dan lemahnya perlindungan hukum atas hak tanah mereka, turut mempersempit ruang lingkup implementasi rekomendasi PBB.

### ***Keterbatasan Wewenang PBB dalam Menekan Australia***

PBB hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota termasuk Australia. PBB dapat menyerahkan rekomendasi tentang UPR dan mekanisme hak asasi manusia lainnya, tetapi Australia tidak memiliki wewenang untuk mengucapkan selamat tinggal pada kebijakan yang sesuai dengan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (United Nations, 2007). UNDRIP adalah instrumen hukum internasional yang tidak mengikat. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi negara untuk mengimplementasikannya.

Australia secara resmi mendukung UNDRIP pada tahun 2009, tetapi penjelasan ini tidak mengikat dan dokumen tersebut tidak memiliki kebijakan hukum langsung dalam orientasi hukum nasional (Kusuma, 2023). Akibatnya, berbagai upaya yang dilakukan oleh perwakilan PBB sering kali berbenturan dengan sikap pemerintah Australia yang menolak campur tangan eksternal dalam urusan domestik. Pemerintah Australia juga berulang kali menegaskan bahwa keputusan terkait hak-hak masyarakat adat adalah bagian dari kebijakan internal yang harus ditentukan melalui proses politik dalam negeri.

Salah satu hambatan utama untuk pengakuan hak-hak politik asli Australia adalah kurangnya pengakuan eksplisit dalam Konstitusi. Konstitusi Australia yang diadopsi pada tahun 1901, tidak termasuk hak-hak khusus masyarakat adat. Oleh karena itu, upaya untuk mengubahnya membutuhkan proses politik yang kompleks (VOA Indonesia, 2023). Selain pembatasan hukum, ada juga faktor-faktor politik yang membuat situasi sulit. Banyak partai politik Australia menolak perubahan konstitusional dengan alasan bahwa persepsi resmi pembagian sosial dapat menyebabkan dan memperlambat proses keputusan pemerintah (Kusuma, 2023).

Dalam perdebatan tentang referendum 2023, banyak kampanye menyebarkan narasi bahwa persepsi asli memberikan hak istimewa yang berlebihan. Ini semakin memperkuat oposisi terhadap reformasi politik terintegrasi (VOA Indonesia, 2023). Pernyataan resmi dari pemerintah Australia setelah hasil referendum 2023 juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak berencana untuk mengajukan kembali amandemen dalam waktu dekat yang semakin memperumit perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan politik yang lebih kuat.

### ***Kurangnya Dukungan dari Komunitas Internasional***

PBB telah mendorong Australia untuk mengakui hak-hak politik masyarakat adat, tetapi komunitas internasional masih memiliki dukungan terbatas. Negara-negara yang dipengaruhi seperti AS dan Inggris belum memberikan tekanan diplomatik yang cukup pada Australia untuk mengadopsi reformasi hukum sehubungan dengan masyarakat adat. Faktor geopolitik dan hubungan diplomatik lebih fokus pada kerja sama ekonomi dan keamanan sering diprioritaskan dibandingkan dengan masalah hak asasi manusia (Gurinda, 2019).

PBB mengandalkan negara-negara anggota untuk membatasi Australia untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Namun, banyak negara telah memilih untuk tidak terlibat dalam topik ini karena manfaat politik dan ekonomi mereka di Australia. Kurangnya tekanan diplomatik dari komunitas internasional memungkinkan Australia untuk mempertahankan sistem hukum yang ada tanpa mengikuti rekomendasi internasional (United Nations, 2007). Sebagai perbandingan, negara seperti Kanada dan Selandia Baru telah melakukan reformasi hukum yang lebih progresif dalam mengakui hak-hak masyarakat adat mereka, menunjukkan bahwa tekanan diplomatik dan komitmen nasional berperan penting dalam mendorong perubahan (Sommaliagustina, 2024).

## **Strategi PBB ke Depan untuk Mendorong Pengakuan Hak Politik Masyarakat Adat di Australia**

### ***Meningkatkan Tekanan Melalui Forum Internasional***

Salah satu langkah utama yang dapat diambil PBB untuk mempromosikan pengakuan hak-hak politik asli Australia adalah meningkatkan tekanan dari forum internasional. PBB memiliki berbagai mekanisme untuk memberikan tekanan diplomatik pada negara-negara anggota, termasuk Australia. Mekanisme ini sangat penting setelah referensi referendum 2023, khususnya dalam hal persepsi asli dalam Konstitusi Australia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menggunakan forum seperti Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) dan *Universal Periodic Review* (UPR) untuk menyoroti ketidaksetaraan yang ada dalam hak-hak politik masyarakat adat Australia. (Kusuma N, 2023)

Dewan Hak Asasi Manusia adalah forum utama PBB dan mengevaluasi implementasi standar hak asasi manusia oleh negara-negara anggota. Di forum ini, PBB dapat membuat rekomendasi ke Australia untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak politik masyarakat adat. UPR, mekanisme penelitian universal PBB dapat membantu menilai situasi hak asasi manusia di seluruh negeri, termasuk Australia. Dalam setiap siklus UPR, negara lain dapat membuat rekomendasi sesuai dengan apa yang harus lebih jelas sadar Australia tentang hak politik asli dan langkah-langkah konkret yang harus diambil Australia untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, PBB dapat menggunakan hasil konferensi UPR untuk meminta pemerintah Australia untuk menanggapi tuntutan masyarakat adat dan komunitas internasional yang mendukung hak mereka. (UN Human Rights Council, 2012)

Selain Dewan Hak Asasi Manusia dan UPR, PBB dapat memperkuat peran *UN Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII) dalam mendukung hak politik masyarakat Australia. Forum ini telah menjadi platform utama bagi masyarakat adat di seluruh dunia untuk mengomunikasikan suara mereka kepada negara-negara anggota PBB. Forum ini dapat menggambarkan tantangan perwakilan asli Australia mendapatkan hak politik yang sama. Selain itu, UNPFII akan menyediakan berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok internasional untuk berkolaborasi, pertukaran dan merumuskan rekomendasi yang dapat mempercepat perubahan politik di Australia.

Pentingnya peran forum internasional ini juga tercermin dalam tindakan konkret para ahli hak asasi manusia PBB, dan pada tahun 2023 pemerintah Australia mengeluarkan seruan untuk mendukung perubahan konstitusional untuk mengakui hak-hak politik masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa PBB tidak hanya berfungsi sebagai superior, tetapi juga sebagai pendorong utama negara-negara anggota, termasuk Australia. (OHCHR, 2023)

### ***Mendorong Australia Melalui Mekanisme Ekonomi dan Kerja Sama Bilateral***

Selain Forum Internasional, PBB dapat menggunakan pendekatan yang lebih langsung melalui mekanisme ekonomi dan kerja sama bilateral untuk mendorong Australia untuk mengakui hak-hak politik masyarakat adat. Salah satu kemungkinan bagaimana PBB melakukan hal ini untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara negara dan mendorong mitra dagang Australia untuk memasukkan klausul hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat, dalam kontrak komersial dan investasi. (UN Human Rights Council, 2012)

Perjanjian perdagangan internasional termasuk ketentuan yang mengikat negara dengan standar hak asasi manusia tertentu, termasuk pengakuan hak politik masyarakat adat. Negara-negara dengan komitmen tinggi terhadap hak asasi manusia, seperti Eropa dan Kanada dapat bekerja dengan PBB untuk mengekang Australia dan meningkatkan politik internal. Negara-negara ini dapat menimbulkan sanksi ekonomi atau mengurangi insentif ekonomi untuk perdagangan atau pengurangan jika Australia tidak memenuhi standar hak asasi manusia yang disepakati dalam perjanjian perdagangan internasional. Jenis tekanan ekonomi ini secara signifikan dapat menyebabkan perubahan politik dalam dukungan Australia terhadap hak politik asli. (Hak et al., 2024)

Selain itu, lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF) dapat memainkan peran penting dalam mendukung reformasi politik ini. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini memiliki pedoman berdasarkan negara mana yang menerima dukungan atau pinjaman untuk mematuhi standar hak asasi manusia. Jika Australia

ingin menerima dukungan dari lembaga-lembaga ini untuk proyek-proyek infrastruktur skala besar dan pendanaan ekonomi lainnya, ia harus menunjukkan komitmennya terhadap hak-hak asli. PBB dapat bekerja dengan lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa masalah yang mengakui hak politik masyarakat adat dipertimbangkan dalam keputusan untuk memberikan pinjaman atau investasi. Pendekatan ini memungkinkan tekanan dari sektor ekonomi untuk memperkuat upaya diplomatik yang dilakukan di forum internasional. (yamunaazzahrawibisono, 2025)

PBB juga dapat menggunakan kerja sama bilateral untuk membantu Australia meningkatkan pedoman sehubungan dengan masyarakat adat. Melalui hubungan bilateral dengan negara dengan kebijakan positif tentang hak asli, PBB dapat mempromosikan transfer pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan pengakuan hak politik asli. Misalnya, negara-negara seperti Kanada dapat mendukung pengalaman pengakuan masyarakat adat Australia atas hak politik untuk mengembangkan politik yang lebih terintegrasi dan representatif. (UN Human Rights Council, 2012)

Pendekatan terintegrasi yang menghubungkan diplomasi internasional, mekanisme ekonomi, dan kerja sama bilateral akan memungkinkan PBB untuk menahan Australia di bawah tekanan yang lebih besar. Ini akan mempercepat pengakuan atas hak politik asli dan memungkinkan lebih banyak politik untuk digunakan dalam sistem pemerintah Australia. (Australian Government, 2019).

## **KESIMPULAN**

Permasalahan pengakuan hak politik masyarakat adat di Australia masih menjadi tantangan serius yang berakar pada sejarah kolonialisme, diskriminasi sistemik, dan kegagalan reformasi politik domestik, sebagaimana terlihat dari ditolaknya referendum *Voice to Parliament* pada tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran penting dalam mendorong pengakuan hak politik masyarakat adat melalui pendekatan normatif, advokatif, dan diplomatik. Instrumen seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*, laporan Pelapor Khusus PBB, serta mekanisme seperti *Universal Periodic Review (UPR)* memberikan tekanan moral dan legitimasi internasional agar Australia memenuhi standar hak asasi manusia global. Meskipun PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksa negara anggota, pengaruhnya tetap signifikan sebagai wadah aspirasi masyarakat adat dan sebagai penggerak akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, peran PBB menjadi elemen kunci dalam mendukung perjuangan masyarakat adat menuju pengakuan politik yang adil dan bermartabat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali dinamika politik domestik Australia dan diskursus publik yang membentuk resistensi terhadap pengakuan masyarakat adat, serta melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan pengakuan politik masyarakat adat dalam sistem konstitusionalnya, seperti Kanada dan Selandia Baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Tumbel, Z. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Lex Et Societatis*, 8(1). Amnesty International.

- (2021). Amnesty International Australia 2021 Human Right Barometer. <https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2021/08/2021-AIA-HR-BAROMETER-1.pdf>
- Amnesty International. (2023). Australia: Voice to Parliament referendum fails, but fight for justice continues. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/australia-voice-to-parliament-referendum-fails/>
- Australian Bureau of Statistics. (2021). Aboriginal and Torres Strait Islander population. <https://www.abs.gov.au/statistics/people/aboriginal-and-torres-strait-islander-peoples>
- Australian Government. (2019). Action Plan for the 2019 International Year of Indigenous Languages | Office for the Arts. <https://www.arts.gov.au/what-we-do/indigenous-arts-and-languages/international-decade-indigenous-languages/australian-government-action-plan-2019-international-year-indigenous-languages>
- BBC News. (2023). Australia says No in referendum to recognise Indigenous people. <https://www.bbc.com/news/world-australia-67110380>
- BBC News. (2023). Australia's historic referendum to give Indigenous people a voice fails. <https://www.bbc.com/news/world-australia-67106794>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/5333873.pdf>
- Gurinda, N. C. H. (2019). Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex et Societatis*, 7(2), 98-112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26999>
- Hak, P., Manusia, A., Perdagangan, T., Dalam, O., Lintas, K., Harti, N., & Ilmih, A. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(3), 580. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12736604>
- Kusuma, N. (2023, November 8). Hak Masyarakat Adat Australia Masih Belum Diakui di Dalam Konstitusi. <https://greennetwork.id/kabar/hak-masyarakat-adat-australia-masih-belum-diakui-di-dalam-konstitusi/>
- OHCHR. (2023). Australia: UN experts urge support for Indigenous “Voice” vote. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/australia-un-experts-urge-support-indigenous-voice-vote>
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2023). Statement on Australia referendum. <https://www.ohchr.org/en/statements>
- Reconciliation Australia. (2022). *Constitutional Recognition*. <https://www.reconciliation.org.au>
- Sommaliagustina, D. (2024, November 25). Perbandingan Hukum Adat di Indonesia dengan Sistem Hukum Adat di Berbagai Negara. <https://portalhukum.id/opini-hukum/perbandingan-hukum-adat-di-indonesia-dengan-sistem-hukum-adat-di-berbagai-negara/>
- UN. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>
- UN Human Rights Council. (2012, August 14). International Justice Resource Center. <https://ijrcenter.org/un-human-rights-council/>

- UN Human Rights Council. (2021). Universal Periodic Review – Australia. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/au-index>
- United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). [https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP\\_E\\_web.pdf](https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf)
- United Nations. (2024). UNPFII Recommendation Database. <https://unpfi.desa.un.org/recommendations/australia-1>
- United Nations DESA. (2023). 22nd Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfi-sessions-2/22nd-session.html>
- United Nations Development Programme. (2022). Empowering Indigenous voices in governance. <https://www.undp.org/publications>
- United Nations Human Rights Council. (2021). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Australia. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/au-index>
- United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). (2023). 22nd Session Report. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfi-sessions-2/22nd-session.html>
- United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. (2024). Webpage Advance Unedited Version UNPFII 2024. [https://social.desa.un.org/sites/default/files/Webpage\\_Unedited-version\\_UNPFII\\_2024\\_rev.pdf](https://social.desa.un.org/sites/default/files/Webpage_Unedited-version_UNPFII_2024_rev.pdf)
- VOA Indonesia. (2023). Referendum Australia Ditolak, Suara Aborigin Tetap Tertindas. <https://www.voaindonesia.com/a/referendum-australia-ditolak-suara-aborigin-tetap-tertindas/7310226.html>
- VOA Indonesia. (2023, October 14). Australia Mulai Referendum Bersejarah untuk Hak Masyarakat Adat. <https://www.voaindonesia.com/a/australia-mulai-referendum-bersejarah-untuk-hak-masyarakat-adat/7310664.html>
- yamunaazzahrawibisono. (2025, March 18). The Significance of the UPR in the Absence of a Regional Human Rights System. Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/yamunaazzahrawibisono5753/67d8f3adc925c44b2064cc72/the-significance-of-the-upr-in-the-absence-of-a-regional-human-rights-system?page=all#goog\\_rewarded](https://www.kompasiana.com/yamunaazzahrawibisono5753/67d8f3adc925c44b2064cc72/the-significance-of-the-upr-in-the-absence-of-a-regional-human-rights-system?page=all#goog_rewarded)